

PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI JAWA BARAT PADA PELITA V SERTA ARAH PENGEMBANGAN DALAM PELITA VI

H. Lukmansyah Haiyinegara
Kanwil Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Barat

PENDAHULUAN

Dalam memacu Pembangunan Nasional pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya, pembangunan sektor industri terus ditingkatkan untuk menciptakan Masyarakat Industri yang maju sebagai perwujudan serta pengamalan Pancasila.

Pembangunan masyarakat industri mengandung makna transformasi masyarakat menuju masyarakat yang maju baik secara struktural maupun kultural yang mana merupakan dua dimensi perubahan masyarakat yang menyatu untuk mewujudkan masyarakat industri dalam arti yang seluas-luasnya.

Dimensi struktural tampak pada daya upaya merubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Masyarakat yang ditopang dua kekuatan pokok yaitu industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh. Industri maju di dalamnya terkandung struktur yang kokoh serta terkait erat dengan sektor ekonomi lainnya, didukung oleh penguasaan teknologi serta mempunyai daya saing kuat dalam memasuki pasaran global. Sedangkan dimensi kultural tampak pada tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai baru yang sangat bermanfaat dalam menopang terbentuknya sikap dan tingkah laku rasional, etos kerja, menghargai waktu, kompetitif, orientasi masa depan, mandiri, produktif dan lain-lain.

Mengacu pada sasaran utama menciptakan masyarakat industri dalam arti seluas-luasnya itu, maka berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 utamanya melihat makna dari pasal 33, telah digariskan kebijaksanaan strategis industrialisasi yang tercermin dalam Pola Pembangunan Industri Nasional, diletakkan dengan cakrawala pandang jauh ke depan, memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh untuk mengantisipasi perubahan dan tantangan masa depan.

Pola Pembangunan Industri Nasional telah dilaksanakan secara konsisten dan ternyata sudah teruji ketepatannya. Pada tahun ketiga Pelita V atau tahun ke 23 dari pembangunan

jangka panjang 25 tahun pertama tampak bahwa pembangunan industri nasional telah berhasil memenuhi amanat GBHN yaitu menciptakan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dengan pertanian, industri menjadi tulang punggung ekonomi dan industri siap memasuki era tinggal landas dalam Pelita VI.

PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DI JAWA BARAT SELAMA PELITA V.

Tahap akhir PELITA V, Industri Nasional telah tumbuh dan berkembang mantap, serta mencapai momentum yang semakin mampu berkembang dengan kekuatan sendiri. Hal ini disebabkan :

- Telah bangkitnya dunia usaha sebagai pelaku ekonomi yang semakin dinamis, efisien dan tangguh terhadap peluang-peluang yang ada, baik di pasar dalam negeri yang semakin berkembang maupun untuk pasaran ekspor yang sangat potensial.
- Arah kebijaksanaan pembangunan Industri Nasional yang semakin benar dan mantap.
- Dukungan iklim usaha yang semakin kondusif melalui serangkaian kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi.

Pengembangan industri didorong kearah industri-industri yang berdaya saing kuat, yaitu yang memanfaatkan dan dapat mengembangkan keunggulan komparatif menuju keunggulan kompetitif. Di samping itu untuk dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi dewasa ini dan dalam waktu yang akan datang, maka pengembangan industri harus mampu memanfaatkan peluang pasar yang tersedia, utamanya peluang pasar yang potensial baik pasaran ekspor maupun dalam negeri.

Pembangunan sektor industri memasuki PJP II, mulai Pelita VI ini sektor industri siap memasuki era tinggal landas. Sampai dengan akhir Pelita V, pengembangan industri di Jawa Barat telah berkembang dengan baik. Terbukti dengan makin besarnya prosentase PDRB sek-

tor industri terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat, di mana pada akhir Pelita V telah mencapai 24,62 %, juga telah terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang antara sektor industri dengan pertanian, pada akhir Pelita V prosentase PDRB sektor pertanian mencapai 20,39 %.

Dengan mengacu kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan hasil pembangunan sektor industri di Jawa Barat selama Pelita V selain ditunjukkan makin besarnya prosentase PDRB, juga diperlihatkan dengan makin besarnya Laju Pertumbuhan sektor industri di mana pertumbuhan sektor industri selama PJPT I mencapai sekitar 13,9 % per-tahun. Perkembangan tersebut ditunjukkan pula dengan peningkatan jumlah unit usaha yang pada akhir Pelita V mencapai 234,867 unit usaha, jumlah investasi sebesar 22,57 triliun rupiah dan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.742.847 orang.

Dalam usaha pendalaman dan pemantapan struktur industri di Jawa Barat, industri hulu di Jawa Barat telah berkembang khususnya untuk beberapa produk industri kimia dasar dan logam dasar dengan dihasilkannya bahan baku bagi industri hilirnya. Demikian juga dengan industri hilirnya yang lebih dikenal dengan kelompok Aneka Industri, sudah banyak jenis produk yang dapat dibuat di Jawa Barat, sehingga dalam perkembangannya sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri juga misinya dalam pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Pengembangan industri kecil di Jawa Barat, sudah cukup baik dengan makin meningkatnya jumlah unit usaha, makin tingginya jumlah penyerapan tenaga kerja sehingga dapat membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja juga dalam kaitannya dengan program pengentasan kemiskinan. Hal lain dari pengembangan Industri Kecil adalah dengan telah berkembangnya program keterkaitan antara Industri Kecil dengan Bapak Angkat, baik Bapak Angkat dari perusahaan besar maupun dari BUMN dengan memanfaatkan dana keuntungan 1-5 % bagi pengembangan Industri Kecil.

Pengembangan ekspor hasil industri Jawa Barat selama Pelita V telah berkembang dengan baik, ditunjukkan dengan tingginya nilai ekspor serta makin beragamnya produk-produk industri yang telah diekspor.

Komoditi andalan ekspor Jawa Barat di antaranya tekstil dan barang tekstil, besi baja,

barang elektronika, industri rotan, industri barang dari kulit, produk kayu gergajian, dan lain-lain. Selama 5 tahun pada Pelita V, total nilai ekspor meningkat sebesar 167,4 % yaitu dari 1.630,06 juta US Dolar pada awal Pelita V (tahun 1989) meningkat menjadi 4.358,99 juta US Dolar pada tahun 1993 Pelita V dengan rata-rata peningkatan sebesar 27,88 % setiap tahun.

Dalam mengantisipasi perkembangan industri yang pesat terutama penyediaan lahan, Jawa Barat telah mengalokasikan lahan kawasan industri seluas 27.100 Ha. yang terbesar di 9 kabupaten di Jawa Barat.

PERTUMBUHAN DAN PERANAN INDUSTRI DI DALAM PDRB JAWA BARAT

Bila dilihat selama periode tahun 1988-1992, Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat secara umum di atas laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Secara rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat selama periode Tahun 1988-1992 adalah 7,96 % (termasuk migas) dan 8,41 % (tanpa migas), dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat-Indonesia tahun 1988-1992, atas dasar harga konstan tahun 1983 [1].

Tahun	Termasuk MIGAS		Tanpa MIGAS	
	Indonesia (%)	Jawa Barat (%)	Indonesia (%)	Jawa Barat (%)
1988	5,78	8,06	7,56	9,11
1989	7,46	8,16	7,92	8,74
1990	7,14	9,45	7,64	8,95
1991	6,60	6,89	6,30	7,56
1992	6,29	7,23	8,11	7,67
Rata-rata	6,84	7,96	7,51	8,41

Pertumbuhan ekonomi sektoral merupakan gambaran tentang perilaku masing-masing sektor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Sedangkan untuk melihat peranan masing-masing sektor terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat yaitu dengan melihat peranan distribusi persentase PDRB sektoral terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat. Dari peranan distribusi persentase PDRB tersebut akan terlihat bagaimana kea-

daan struktur ekonomi Jawa Barat pada periode 1988-1992 untuk lebih jelasnya, perhatikan Tabel 2 di bawah ini.

Tinjauan terhadap Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri, selama kurun waktu 1988-1992 dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 2. Distribusi Persentase PDRB Propinsi Jawa Barat atas dasar harga konstan tahun 1983 (tanpa migas) tahun 1988 dan tahun 1992 [1].

No.	Lapangan usaha	Peranan (%)	
		1988	1992
01	Pertanian	22,63	20,39
02	Pertambangan dan Penggalian	0,33	0,31
03	Industri	21,65	24,62
04	Listrik, Gas dan Air minum	1,52	2,27
05	Bangunan	7,72	7,48
06	Perdagangan, Hotel dan Restorant	23,68	23,40
07	Pengangkutan dan Komunikasi	6,68	6,34
08	Bank dan Lembaga Keuangan lainnya	1,64	3,02
09	Sewa Rumah	1,95	1,68
10	Pemerintah	8,24	6,63
11	Jasa-Jasa	3,96	3,87
Total		100,00	100,00

Dari Tabel 2 terlihat selama kurun waktu 1988-1992, terjadi perubahan struktur ekonomi Jawa Barat, walaupun selama kurun waktu tersebut struktur ekonomi Jawa Barat masih tetap di dominasi oleh sektor Pertanian, Industri dan Perdagangan. Tahun 1988 peranan yang terbesar adalah sektor Perdagangan yaitu sebesar 23,68 %, diikuti sektor Pertanian sebesar 22,63 % serta sektor Industri sebesar 21,65 %.

Pada tahun 1992 terjadi perubahan struktur di mana peranan terbesar beralih ke sektor industri yaitu sebesar 24,62 %, diikuti sektor perdagangan sebesar 23,40 % serta sektor pertanian sebesar 20,39 %.

Sektor industri sendiri, peranannya terhadap perekonomian Jawa Barat dari tahun ke tahun semakin meningkat dari 21,65 % pada tahun 1988 menjadi 24,62 % pada tahun 1992, diperkirakan akhir 1993 mencapai 25,25 %. Perkembangan secara rinci lihat Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB sektor industri terhadap PDRB Jawa Barat selama kurun waktu 1988-1992 atas dasar harga konstan tahun 1983 (tanpa migas).

Lapangan usaha	Tahun (%)				
	1988	1989	1990	1991	1992
Industri	21,65	22,56	23,47	24,36	24,62
Industri besar & sedang	18,44	19,46	20,45	21,29	21,57
Industri kecil & rumah tangga	3,21	3,10	3,01	3,07	3,05

PERTUMBUHAN DAN PERANAN INDUSTRI ANTAR WILAYAH PEMBANGUNAN

Peranan masing-masing wilayah Pembangunan di Jawa Barat selama kurun waktu 1988-1992 dapat dilihat pada Tabel 5

Untuk melihat seberapa jauh peranan sektor industri terhadap pembentukan PDRB di masing-masing wilayah pembangunan, dapat dilihat pada Tabel 6.

PERKEMBANGAN INDUSTRI NON PMA/ PMDN DI JAWA BARAT

Selama periode Pelita V, perkembangan industri di Jawa Barat memperlihatkan kondisi yang menggembirakan. Untuk mengkaji perkembangan tersebut, secara makro diambil beberapa variabel yang berpengaruh di antaranya kelompok industri, jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja dan investasi seperti yang diperlihatkan pada Tabel 7, 8 dan 9.

Tabel 4. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri atas dasar harga konstan 1983 (tanpa migas)
[1]

Lapangan Usaha	Tahun (%)				
	1988	1989	1990	1991 *)	1992 **)
Industri	12,40	13,35	13,31	11,64	8,82
Industri besar & sedang	12,83	14,79	14,49	11,97	9,06
Industri kecil & rumah tangga	10,02	5,04	5,94	9,44	7,12

Catatan : *) Angka diperbaiki, **) Angka sementara

Tabel 5. Distribusi persentase PDRB Propinsi Jawa Barat menurut wilayah pembangunan atas dasar harga konstan 1983 (tanpa migas) [1]

No.	Wilayah pembangunan	Tahun (%)				
		1988	1989	1990	1991	1992
1.	Banten	11,23	11,52	12,00	12,46	12,38
2.	Botabek	23,79	24,01	24,63	24,87	25,04
3.	Sukabumi	3,67	3,35	3,26	3,09	3,16
4.	Bandung Raya	29,70	30,00	30,32	30,42	30,97
5.	Priangan Timur	7,86	7,63	7,34	7,16	7,07
6.	Cirebon	15,36	15,12	14,50	14,16	13,79
7.	Purwasuka	8,38	8,36	7,96	7,84	7,59
Jawa Barat		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 6. Distribusi sektor industri terhadap PDRB wilayah pembangunan atas dasar harga konstan 1983 (tanpa minyak) tahun 1988 - 1992. [1]

No	Wilayah pembangunan	Tahun (%)				
		1988	1989	1990	1991	1992
1.	Banten	39,51	41,94	41,80	43,23	43,35
2.	Botabek	27,00	27,77	29,17	29,81	30,24
3.	Sukabumi	8,64	9,48	9,73	10,16	9,91
4.	Bandung Raya	24,35	25,08	25,51	26,29	26,26
5.	Priangan Timur	12,69	13,12	13,41	13,66	13,81
6.	Cirebon	5,07	5,10	5,07	5,31	5,40
7.	Purwasuka	9,99	9,94	10,26	10,61	10,75

KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DI JAWA BARAT SELAMA PELITAVI.

Arah Pengembangan Industri Dalam PJP II.

Adapun Tujuan serta Strategi Dasar adalah sesuai dengan kebijaksanaan dalam Pengembangan Industri Nasional seperti sebagai berikut :

1. Tujuan

Berdasarkan potensi kemampuan dan peluang untuk tumbuh, serta dengan memperhatikan perkiraan lingkungan strategis, pengembangan sektor industri dalam PJP II ditujukan untuk membangun sektor industri di Indonesia sebagai kekuatan industri maju yang diperhitungkan, yang mempunyai 4 ciri sebagai berikut :

Tabel 7. Realisasi perkembangan unit usaha sektor industri di Jawa Barat selama Pelita V berdasarkan kelompok industri [2]

No.	Kelompok industri	Akhir pelita IV	Akhir pelita V	Peningkatan rata-rata/th
1.	Industri kimia dasar	193	245	5,38 %
2.	Industri mesin logam & elektronika	330	420	5,45 %
3.	Aneka industri	2.478	2.780	2,44 %
4.	Industri kecil *)	185.405	231.422	4,96 %
Total		188.406	234.867	4,93 %

Catatan : *) termasuk industri formal dan non-formal

Tabel 8. Realisasi penyerapan tenaga kerja sektor industri di Jawa Barat selama Pelita V berdasarkan kelompok industri [2].

No	Kelompok industri	Akhir pelita IV	Akhir pelita V	Peningkatan rata-rata/th
1.	Industri kimia dasar	41.073	43.042	0.95 %
2.	Industri mesin logam dasar & elektronika	67.693	74.590	2.04 %
3.	Aneka industri	425.854	555.190	6.06 %
4.	Industri kecil *)	878.139	1.742.025	4.37 %
Total		1.412.759	1.742.847	4.67 %

Catatan : *) termasuk industri formal dan non-formal

Tabel 9 : Realisasi investasi sektor industri di Jawa Barat selama Pelita V berdasarkan kelompok industri [2].

No	Kelompok industri	Akhir pelita IV (juta Rp.)	Akhir pelita V (juta Rp.)	Peningkatan rata-rata/th
1.	Industri kimia dasar	5.866	6.475	2.08%
2.	Industri mesin logam dasar & elektronika	9.411	10.724	2.79%
3.	Aneka industri	4.026	5.078	5.23%
4.	Industri kecil *)	0.187	0.290	11.01 %
Total		19.490	22.562	3.16%

Catatan : *) termasuk industri formal dan non-formal

a. Mandiri

Kemampuan memenuhi kebutuhan dan kemampuan tumbuh atas kekuatan sendiri.

b. Seimbang dan serasi.

Keseimbangan peran ekonomi dan pelaksanaan misi pembangunan, serta keserasian hubungan antara pelaku/industri/masyarakat/lingkungan.

c. Kuat

Ketahanan perekonomian/sektor industri menghadapi gejala dan gangguan dari dalam/luar.

d. Maju

Kemampuan menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi dari aspek teknologi/budaya.

2. Strategi Dasar

Pembangunan sektor industri dilaksanakan dengan menempuh strategi dasar mengembangkan industri berdaya saing kuat yang berbasis keunggulan kompetitif, melalui :

- a. Peningkatan peran SDM industrial yang berkualitas, utamanya dari aspek kemampuan penguasaan teknologi.
- b. Penciptaan iklim persaingan yang mendorong penerapan efisiensi, produktivitas dan mutu.
- c. Perluasan wawasan pasar ke arah global (outward looking) di samping memantapkan pemenuhan pasar dalam negeri, dengan tetap menganut prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan menitikberatkan pada industri-industri yang berciri :

1. Industri yang bertumpu pada SDA dalam negeri (Resource Based Industries).
2. Industri yang padat karya (Labour Intensive Industries).
3. Industri yang padat teknologi (Technology Based Industries)

Kebijakan Pengembangan Industri Dalam Pelita VI.

1. Sasaran Pengembangan Industri Pada Pelita VI.
 - a. Meningkatnya produktivitas dan efisiensi ekonomi nasional khususnya sektor industri sehingga dapat mencapai pertumbuhan yang tinggi, melalui : pengembangan penguasaan teknologi/manajemen, SDM yang lebih berkualitas, pelaku industri yang lebih profesional/berdisiplin nasional tinggi dan sebagainya.
 - b. Meningkatnya daya saing industri nasional baik di pasaran dalam negeri maupun di pasaran internasional.
 - c. Menguatnya struktur industri nasional baik di pasaran dalam negeri maupun pasaran internasional.
 - d. Meningkatnya peranan industri kecil dan menengah dalam rangka keseimbangan dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan industri serta perluasan lapangan kerja baru.
 - e. Tumbuhnya industri di daerah-daerah yang kurang maju termasuk di kawasan timur Indonesia.
2. Kebijakan Utama Pengembangan Industri Pada Pelita VI.

- a. Penataan struktur industri nasional agar tumbuh semakin kokoh dan kuat dalam rangka meningkatkan kemandirian dan melipat gandakan nilai tambah.
 - b. Pemantapan daya saing industri agar lebih meningkatkan penguasaan pasar dalam negeri, sekaligus sebagai basis untuk mendukung peningkatan ekspor non-migas dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi.
 - c. Percepatan upaya penguasaan teknologi industri baik di bidang perangkat lunak yang mencakup kemampuan inovasi melalui penelitian terapan, rancang bangun, perekayasa, maupun penerapannya dalam kemampuan produksi perangkat keras yang semakin padat teknologi, utamanya barang modal/mesin.
 - d. Pemantapan kualitas profesionalisme SDM industri baik dari kalangan dunia usaha maupun aparatur pemerintah sebagai penggerak pembangunan yang handal untuk mewujudkan masyarakat industrial.
 - e. Penciptaan keseimbangan yang baik, sehat dan serasi dalam pembangunan industri dari aspek peran serta masyarakat dan pemilikan usahanya dalam kegiatan industri kecil dan industri menengah dengan industri besar, maupun dari aspek keseimbangan sumbangan saham terhadap PDB antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya, serta peningkatan penyebaran pembangunan industri dalam rangka ikut serta memeratakan pengembangan wilayah.
3. Kebijakan Penunjang Pengembangan Industri Dalam Pelita VI.

Kebijakan utama dalam pengembangan Industri Nasional pada Pelita VI perlu didukung dengan :

 - a. Peraturan dan perundangan dalam pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri nasional, sebagai sarana penunjang dibidang hukum, dengan penjabaran lebih lanjut dari undang-undang no. 5 tahun 1984 serta peraturan pemerintah no. 17 tahun 1986.
 - b. Pengelompokan industri nasional ke dalam kelompok industri hulu/dasar, industri hilir, dan industri kecil, sebagai pengemban misi pertumbuhan dan pemerataan sesuai dengan ciri masing-masing kelompok.

c. Konsolidasi dan peningkatan kemampuan aparaturnya pembina industri baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Kebijakan Daerah Dalam Pembangunan Industri Jawa Barat.

Dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada arahan GBHN dalam Pelita VI ditempuh serangkaian kebijaksanaan pembangunan industri yang bertumpu pada strategi :

- a. Pembangunan industri yang berspektrum luas yang berorientasi pada pasar regional maupun internasional, baik industri padat SDA, padat teknologi dan padat karya serta padat ketrampilan.
- b. Pembangunan industri dengan mempercepat penguasaan teknologi dalam rangka memantapkan basis industrialisasi untuk menghasilkan produk-produk industri unggulan.
- c. Pembangunan industri bertumpu pada mekanisme pasar dengan dunia usaha sebagai pemeran utamanya.
- d. Pembangunan industri yang mengutamakan tercapainya pertumbuhan bersama dengan pemerataan dengan memberikan prioritas pada berbagai industri yang mampu tumbuh dengan cepat dan meningkatkan peran serta masyarakat secara luas dan produktif.

Dalam mengembangkan industri yang tangguh, maka kebijaksanaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan industri diarahkan pada pengisian kawasan industri yang sudah ada.
- b. Pembangunan prasarana pendukung di kawasan industri terutama air, listrik, telekomunikasi serta peningkatan dan pengembangan jaringan jalan untuk menunjang pengembangan kawasan industri.
- c. Peningkatan keterkaitan antar industri dan antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanam modal.
- d. Pendayagunaan kemampuan rancang bangun dan rekayasa serta peningkatan pemanfaatan bahan baku dan komponen dalam negeri.
- e. Mengembangkan industri yang mengolah bahan mentah hasil pertanian dalam rangka peningkatan nilai tambahnya.
- f. Pembangunan industri diupayakan untuk meningkatkan daya saing hasil industri terutama untuk pasar luar negeri dengan

tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- g. Pemanfaatan kesempatan berusaha demi terciptanya iklim usaha yang dapat memantapkan pengembangan industri.
- h. Mendorong pengembangan industri strategis secara bertahap.
- i. Pemanfaatan pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan nilai tambah komoditas industri.
- j. Penerapan teknologi tepat guna, pembinaan pada industri kecil dan kerajinan di desa-desa pusat pertumbuhan serta pada Lingkungan Industri Kecil.
- k. Peningkatan kemitraan antara industri berskala besar, menengah dan kecil.
- l. Pengembangan agroindustri yang didukung oleh pertanian yang tangguh.

5. Sasaran kuantitatif.

Selama Pelita VI, sektor industri Jawa Barat diproyeksikan akan mengalami perkembangan sebagai berikut :

a. Laju Pertumbuhan Sektor Industri

Laju pertumbuhan sektor industri Jawa Barat sebesar 11 %, dan laju pertumbuhan untuk setiap kelompok sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---|------|
| a. Kelompok IKD | : | 12 % |
| b. Kelompok IMLDE | : | 17 % |
| c. Kelompok AI | : | 11 % |
| d. Kelompok IK | : | 6 % |

b. Saham sektor industri terhadap PDRB

Pada akhir Pelita VI peranan sektor industri terhadap pembentukan PDRB Jawa Barat diharapkan mencapai sekitar 27,25 %. Pada akhir Pelita X diharapkan mencapai 35,20 %.

c. Ekspor Hasil Industri

Melihat perkembangan ekspor selama Pelita V, maka pada akhir Pelita VI ekspor industri Jawa Barat diharapkan mencapai US \$ 12,32 milyar dengan kenaikan rata-rata 21,8 % pertahun.

d. Kebutuhan Investasi

Kebutuhan investasi sektor industri pada Pelita VI diproyeksikan sebesar Rp. 16,53 triliun selama Pelita V, dengan perincian :

- | | | |
|-------------------|---|-------------------|
| a. Kelompok IKD | : | Rp. 7,57 triliun |
| b. Kelompok IMLDE | : | Rp. 4,32 triliun |
| c. Kelompok AI | : | Rp. 4,27 triliun |
| d. Kelompok IK | : | Rpp. 0,37 triliun |

e. Penyerapan Tenaga Kerja

Untuk mencapai investasi yang telah ditetapkan pada Pelita VI, diharapkan sektor industri dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 346.567 orang, dengan perincian :

- a. Kelompok IKD : 14.399 orang
- b. Kelompok IMLDE : 15.145 orang
- c. Kelompok AI : 132.281 orang
- d. Kelompok IK : 184.742 orang

HAMBATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA.

Mengingat posisi Jawa Barat sebagai penyangga DKI Jakarta yang merupakan Pusat Pemerintahan Nasional dan Perdagangan Internasional, maka lingkungan strategis global yang diuraikan berikut akan langsung berpengaruh terhadap perkembangan industri Jawa Barat.

1. Globalisasi yang didorong kemajuan pesat di bidang teknologi terutama teknologi komunikasi, menyebabkan semakin derasnya arus informasi dengan segala dampaknya baik positif maupun negatif. Peluang yang timbul dari globalisasi adalah makin terbukanya pasaran internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.
2. Perkembangan lingkungan strategis baik tingkat regional maupun internasional, dapat menimbulkan berbagai peluang dan kendala bagi upaya pengembangan ekonomi nasional.
3. Indonesia dan negara-negara berkembang berperan aktif dalam Putaran Uruguay, guna menciptakan sistem perdagangan internasional yang baik dan menguntungkan Indonesia.
4. Arus globalisasi dan gerakan regionalisasi mengakibatkan adanya saling ketergantungan yang makin erat dan mengarah kepada integrasi ekonomi dunia.

Meskipun laju pertumbuhan industri Jawa Barat cukup tinggi sehingga telah menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Barat, namun demikian untuk pengembangan selanjutnya masih terdapat permasalahan, antara lain:

1. Industri yang telah ada beraglomerasi di sekitar Serang, Botabek dan Bandung. Di lain pihak Sistem Tata Ruang Wilayah Jawa Barat masih dalam proses penyusunan. Oleh sebab itu untuk pemerataan/penyebaran industri agar terdapat keseimbangan

antar wilayah, penyelesaian tata ruang wilayah perlu dipercepat.

2. Infra struktur (prasarana) untuk menunjang perkembangan industri masih terbatas, oleh sebab itu perlu koordinasi perencanaan lintas sektoral yang lebih mantap dan penjadwalan pembangunan yang lebih terpadu.
3. Peranan investasi di sektor industri sebagian besar dibebankan kepada pihak swasta.
4. Untuk mempertahankan laju perkembangan industri yang telah ada, masih perlu dorongan tumbuhnya wirausahawan industri yang baru.
5. Angkatan kerja yang tersedia mayoritas pada tingkat pendidikan rendah, sedangkan kesempatan kerja yang sulit dipenuhi adalah manajer menengah. Oleh sebab itu perlu adanya intensifikasi pelatihan-pelatihan untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.
6. Interaksi antara lembaga pendidikan umum dan kejuruan maupun lembaga pelatihan masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kesesuaian antara permintaan dan pasokan tenaga kerja industrial.
7. Interaksi antara lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan perlu dimantapkan agar terjadi sinergi dalam rangka penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna maupun rekayasa industrinya.
8. Untuk membentuk BUMN, Swasta dan Koperasi menjadi pilar-pilar ekonomi, BUMN perlu dimampukan eksistensinya dan koperasi perlu lebih intensif pembinaannya.
9. Mengingat di Jawa Barat telah dicadangkan lahan-lahan untuk kawasan industri dan potensial untuk menunjang program ekspor, namun pembangunannya masih tersendat-sendat, maka perlu keterpaduan penanganannya.
10. Tuntutan terhadap industri yang berwawasan lingkungan sudah semakin mendesak sedangkan sekarang ini masih terdapat kelemahan pada aspek kelembagaan. Oleh sebab itu perlu adanya penanganan yang lebih sistematis.
11. Dengan adanya rencana realisasi asas desentralisasi dan dekonsentrasi pemerintahan maka perlu diimbangi penyediaan aparatur yang lebih mapan.
12. Untuk mengimbangi dinamika permasalahan yang muncul di lapangan, pembinaan

aparatur perlu memperoleh prioritas penanganan.

Langkah pemecahan masalah yang telah dan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi perwilayahan industri dengan mengidentifikasi permasalahan dan mengkoordinasikan pemecahannya kepada instansi terkait.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk menangani masalah keterampilan tenaga kerja.
3. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan untuk meningkatkan keterampilan manajemen usaha/administrasi perkreditan untuk kelancaran kredit dan pengembaliannya.
4. Menjalin kerjasama dengan Asosiasi Dunia Usaha untuk bersama-sama melancarkan arus informasi maupun pemecahan masalah bisnis.
5. Menjalin kerjasama lintas sektoral untuk menangani masalah infra struktur lahan/wilayah industri.
6. Mengintensifkan penanganan masalah air bersama-sama instansi terkait.
7. Menggerakkan/memanfaatkan sumber-sumber/potensi yang ada untuk membina industri agar mampu berproduksi yang berwawasan lingkungan.
8. Menggerakkan sumber-sumber/potensi yang ada untuk ikut membina dan mengembangkan industri kecil dan menengah.
9. Melakukan pembinaan untuk merealisasikan kemitraan usaha dalam rangka memperkuat struktur industri.
10. Mendorong dunia usaha agar secara kontinu meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya.
11. Pembinaan standarisasi yang terus menerus.
12. Penyebar luasan kesempatan pengembangan industri di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. PDRB Jawa Barat tahun 1988 - 1992. Kantor Statistik Jawa Barat
2. Kanwil Perindustrian Jawa Barat berdasarkan izin usaha industri (Non-fasilitas)